

Nama : Alzirah Sabrina

NPM : 2413031049

Kelas : 2024 B

Jawab:

1. Analisis Perilaku Konservatif PT Lestari Mineral

Motivasi Perilaku Konservatif:

- Kepatuhan dan Kehati-hatian (Prudence): Motivasi utama adalah menerapkan prinsip kehati-hatian (prudence) dalam akuntansi. Dengan mengakui biaya reklamasi lebih awal atau dalam jumlah penuh, perusahaan mengantisipasi kewajiban di masa depan dan menghindari penggelembungan laba.
- Memenuhi Ekspektasi Regulator/Lingkungan: Sebagai perusahaan tambang di Indonesia, mereka beroperasi di bawah pengawasan ketat pemerintah. Pendekatan konservatif menunjukkan komitmen pada tanggung jawab lingkungan, yang dapat memperkuat legitimasi dan hubungan baik dengan regulator.
- Manajemen Laba "Positif": Berlawanan dengan keinginan investor, manajemen mungkin sengaja melaporkan laba lebih rendah untuk kinerja masa depan yang lebih stabil atau untuk mendapatkan kelonggaran tertentu dari pemerintah.
- Mencerminkan Nilai Keberlanjutan: Perilaku ini selaras dengan wacana pemerintah tentang standar keberlanjutan, sehingga perusahaan diposisikan sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab.

Potensi Dampak terhadap Stakeholders:

- Investor: Dampak negatif karena laba yang dilaporkan lebih rendah dapat menurunkan harga saham dan minat investasi jangka pendek.
- Pemerintah: Dampak positif. Pemerintah melihat perusahaan sebagai entitas yang patuh dan transparan dalam mengungkapkan risiko lingkungan.
- Masyarakat dan Aktivis Lingkungan: Dampak positif. Mereka mungkin mengapresiasi pengakuan tanggung jawab lingkungan perusahaan, meski laba tampak lebih rendah.
- Kreditor: Dampak bisa positif. Kreditor melihat perusahaan lebih berhati-hati dan rendah risiko karena tidak menyembunyikan kewajiban jangka panjang.

2. Menyikapi Tekanan Investor dan Kaitannya dengan Etika Profesi.

Sikap sebagai Akuntan Perusahaan:

1. Analisis Substansi atas Interpretasi IFRS: Lakukan kajian mendalam terhadap interpretasi IFRS terbaru yang diacu investor. Evaluasi apakah perubahan kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan substansi ekonomi yang lebih baik atau hanya sekadar untuk menaikkan laba.
2. Konsultasi dengan Komite Audit dan Dewan: Bawa masalah ini ke komite audit dan dewan direksi untuk dibahas secara kolektif, bukan semata-mata menuruti tekanan eksternal.
3. Komunikasikan Konsekuensi Jangka Panjang: Jelaskan kepada investor bahwa perubahan kebijakan yang agresif dapat merusak kredibilitas laporan, menimbulkan risiko restatement di masa depan, dan memicu kecurigaan dari regulator.
4. Cari Jalan Tengah: Jika interpretasi IFRS memungkinkan, mungkin dapat diusulkan pengungkapan (disclosure) yang lebih komprehensif sebagai alternatif dari perubahan pengakuan, sehingga informasi tetap transparan tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian.

Apakah Mengikuti Keinginan Investor Bertentangan dengan Etika Profesi?

Ya, bertentangan, jika perubahan kebijakan tersebut:

Tidak Memiliki Dasar Substansial: Hanya didorong keinginan untuk menaikkan laba tanpa perubahan mendasar dalam operasi atau kewajiban.

- Melanggar Prinsip Fundamental: Secara spesifik melanggar prinsip etika akuntan:
- Integritas: Menyajikan laporan yang menyesatkan dan tidak jujur.
- Objektivitas: Terpengaruh oleh tekanan pihak lain, bukan pertimbangan profesional yang independen.
- Kehati-hatian Profesional (Due Care): Tidak menerapkan keahlian profesional secara sungguh-sungguh untuk menghasilkan laporan yang andal.
- Prinsip Prudence (Kehati-hatian): Mengabaikan kewajiban masa depan yang sangat mungkin terjadi.

3. Pengaruh Ekonomi Politik dalam Penetapan Standar Akuntansi

Proses penetapan standar akuntansi tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi merupakan arena tarik-menarik kepentingan berbagai kelompok (theory of regulatory capture).

Contoh dari Kasus PT Lestari Mineral:

- Pemerintah Indonesia ingin merumuskan standar yang mencerminkan keberlanjutan dan transparansi sosial (kepentingan publik).
- Namun, proses ini mendapat tekanan politik dari *asosiasi industri* (kelompok kepentingan ekonomi) yang menginginkan standar yang tidak terlalu memberatkan secara finansial, misalnya dengan menunda pengakuan biaya atau memperlonggar kriteria pengukuran.
- Hasil akhir standar akuntansi nasional akan menjadi cermin dari kompromi politik antara kepentingan publik (lingkungan, transparansi) dan kepentingan industri (efisiensi biaya, profitabilitas).

Contoh dari Realitas Lain:

- Penetapan IFRS 16 (Lease): Sebelum diterapkan, ada lobi yang sangat kuat dari industri penerbangan, ritel, dan perbankan yang khawatir laporan keuangan mereka akan terlihat memiliki utang yang sangat besar karena semua sewa harus dicatat sebagai aset dan liabilitas.
- Penundaan Penerapan PSAK 71/72/73 di Indonesia: Penerapan standar akuntansi finansial instrumen keuangan dan sewa ini sempat ditunda untuk beberapa sektor (seperti BUMN tertentu) karena tekanan dan kekhawatiran akan dampaknya terhadap rasio keuangan dan kemampuan mereka membayar dividen kepada negara.

4. Perbandingan Principles-Based vs Rules-Based dan Relevansinya untuk Indonesia.

- Perbandingan Pendekatan:

Pendekatan berbasis prinsip, seperti yang dianut oleh IFRS, berfokus pada penyajian substansi ekonomi dari suatu transaksi. Standar ini memberikan kerangka prinsip-prinsip dasar yang membutuhkan penilaian profesional yang signifikan dari manajemen dan akuntan. Fleksibilitasnya tinggi karena dirancang untuk dapat diterapkan pada berbagai jenis transaksi

yang kompleks. Kelemahannya terletak pada potensi ketidakkonsistenan dalam interpretasi jika tidak didukung oleh integritas dan kompetensi yang memadai.

Sebaliknya, pendekatan berbasis aturan, seperti GAAP Amerika Serikat, menyediakan seperangkat aturan yang sangat rinci, spesifik, dan seringkali memiliki banyak pengecualian. Pendekatan ini lebih bersifat mekanis dan bertujuan untuk meminimalkan ruang untuk penilaian subjektif. Kelebihannya adalah aturan yang jelas dapat memudahkan proses audit dan kepatuhan. Namun, kelemahan utamanya adalah dapat memicu pencarian celah hukum, di mana perusahaan merancang transaksi secara teknis untuk mematuhi huruf aturan, tetapi melanggar jiwa atau prinsip di baliknya.

— Relevansi untuk Indonesia:

Dalam konteks Indonesia, pendekatan berbasis prinsip seperti IFRS dianggap lebih relevan dan tepat untuk diterapkan. Alasannya pertama adalah harmonisasi global dan daya tarik investasi. Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan konvergensi standar akuntansi nasional dengan IFRS. Hal ini penting untuk memudahkan perusahaan Indonesia mengakses pasar modal internasional dan menarik investor asing, karena laporan keuangan mereka dapat dibandingkan dan dipahami secara global.

Kedua, pendekatan ini mampu mengakomodir keragaman lanskap bisnis Indonesia. Ekonomi Indonesia terdiri dari ribuan UMKM hingga konglomerat besar dengan transaksi yang kompleks. Aturan yang kaku dan seragam tidak akan mampu menjangkau semua variasi ini. Pendekatan prinsip memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menangkap substansi ekonomi dari berbagai model bisnis yang berbeda.

Ketiga, pendekatan berbasis prinsip lebih efektif dalam memerangi kreativitas akuntansi yang negatif. Dengan menekankan substance over form, pendekatan ini mempersulit perusahaan untuk merekayasa laporan keuangan hanya dengan memanfaatkan celah dalam aturan teknis. Kesuksesan pendekatan ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia akuntan yang memiliki integritas dan judgment yang baik, serta pengawasan dan penegakan yang kuat dari regulator seperti OJK dan IAPI, yang merupakan tantangan yang masih perlu terus dibangun di Indonesia.

Relevansi untuk Indonesia:

Pendekatan berbasis prinsip (seperti IFRS) lebih relevan untuk diterapkan di Indonesia.

Alasannya:

1. Konvergensi dengan Standar Global: Indonesia telah berkomitmen mengadopsi IFRS untuk memudahkan perusahaan masuk pasar modal global dan menarik investasi asing.
2. Kesesuaian dengan Karakteristik Bisnis: Ekonomi Indonesia sangat beragam, dari UMKM hingga konglomerat multinasional. Aturan yang kaku (rules-based) tidak akan mampu menjangkau kompleksitas dan variasi transaksi bisnis ini. Principles-based memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan substansi setiap transaksi.
3. Meminimalkan Kreativitas Akuntansi yang Negatif: Pendekatan berbasis prinsip berfokus pada substance over form, sehingga mempersulit perusahaan untuk merekayasa laporan keuangan hanya dengan memanfaatkan celah aturan teknis.
4. Tantangan dan Syarat Keberhasilan: Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kualitas SDM akuntan profesional yang memiliki integritas dan judgment yang baik, serta pengawasan dan enforcement dari regulator (seperti OJK dan IAPI) yang kuat. Inilah yang masih perlu terus dibangun di Indonesia.